BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Pemerintah berupaya menerapkan good governance. Good governance diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya (Zeyn, 2011).

Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* yang transaparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan eksternal (Daim, 2014). Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemerintah berusaha memberi informasi kepada pihak-pihak melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan (Bina et al., 2014). Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun

dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Indonesia, 2010). SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

PSAP merupakan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan kaporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansi, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan (Dwitayanti et al., 2018). Standar akuntansi yang mengatur tentang aset tetap yaitu PSAP No.07. PSAP No. 07 berisikan pedoman mengenai klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pertukaran, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap. Tujuan dari penerapan PSAP No.07 adalah agar memperoleh laporan keuangan atas aset tetap yang akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan sumber-sumber daya yang mendukung. Salah satunya yaitu investasi atas aset tetap. Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas instansi pemerintahan karena aset tetap berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu instansi pemerintahan (Dwitayanti et al., 2018). Penggunaan seperti pemanfaatan kendaraan yang digunakan oleh pegawai dalam melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota dan penggunaan komputer yang berfungsi untuk dan mengolah data .

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga Pemerintah NonKementrian

yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman dalam melakukan perlakuan akuntansi aset tetap dibutuhkan oleh setiap instansi. Pemahaman yang kurang dapat menimbulkan risiko kelalaian dan kurang maksimalnya terhadap pencatatan aset tetap. Kurangnya pemahaman terhadap perlakuan akuntansi terjadi pada pertukaran aset tetap. Perlakuan akuntansi menurut PSAP No.07 tentang Aset Tetap menjelaskan bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya (*PSAP NO.07*, 2010). Pemahaman yang kurang terhadap pertukaran aset menimbulkan perspektif bahwa aset tetap tidak boleh dilakukan pertukaran. Dengan hal ini, pemahaman yang baik menyebabkan kesesuaian terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan dengan yang seharusnya diterapkan.

Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya dalam laporan keuangan (Afrilinda, 2015). Sehingga penyajian dan pengungkapan yang relevan dan andal atas informasi aset tetap di laporan keuangan menjadi penting. Dalam kaitan penyusunan laporan keuangan maka peraturan perundang-undangan menjadi pedoman umum dan acuan bagi entitas publik.

Secara garis besar, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait mengamanatkan bahwa rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D), maka setiap entitas pelaporan harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah. Demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Ratmono & Sholihin, 2017: 76).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tertarik untuk meneliti perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui kesesuaian dengan PSAP No. 07 dengan Judul "**Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No.07 pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur**".

1.2. Penjelasan Judul

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka akan diberikan penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi

   Adalah konsep pengakuan, konsep pengukuran/penilaian, konsep pencatatan, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan (Lestari, 2017: 3)

2. Aset Tetap

   Adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Ratmono & Sholihin, 2017: 157).

3. PSAP No. 07

   Adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Aset Tetap (*PSAP NO.07*, 2010).

4. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

   Adalah tempat dilakukan penelitian Tugas Akhir. Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu: "Bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur?"

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis mengharapkan manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

   Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perlakuan akuntansi atas aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Bagi Pembaca

   Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian dalam bidang yang relevan.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

   Agar dapat menjalin kerjasama antara STIE Perbanas Surabaya dengan instansi serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian dan kajian selanjutnya.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS